

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Wr. Mb.



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama tahun 2017 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama tahun 2017. Di tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menyelesaikan kegiatannya dan memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan di dalam upaya memenuhi Visinya "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa*".

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan dan tuangkan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini pada tahun mendatang.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Mamuju, 14 Februari 2018



Balai POM di Mamuju
KEPALA

Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes
NIP. 19630104 198903 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	6
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Utama.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja 2017	21
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
3.3 Analisis Atas Afisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran	64
Lampiran	
Lampiran 1 : FORMULIR RENCANA STRATEGIS	
Lampiran 2 : FORMULIR PERJANJIAN KINERJA	
Lampiran 3 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	
Lampiran 4 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	
Lampiran 5 : FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN	
Lampiran 6 : FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPOM di Mamuju	3
Gambar 2	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	7
Gambar 2	Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi saat ini dan dampaknya	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Periode 2017-2019	16
Tabel 2	Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2017-2019	9
Tabel 3	Defenisi operasional dari Indikator Kinerja Periode 2017-2019	20
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	22
Tabel 5	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017	24
Tabel 6	Capaian Sasaran Strategis	25
Tabel 7	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Mamuju	26
Tabel 8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi	26
Tabel 9	Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2016	27
Tabel 10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi	27
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPOM di Mamuju	35
Tabel 12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi	35
Tabel 13	Realisasi Sampling dan Pengujian Tahun 2017	36
Tabel 14	Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat	39
Tabel 15	Data Sarana Dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2017	41
Tabel 16	Realisasi Indikator Kegiatan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju Tahun 2017	43

Tabel 17	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017	45
Tabel 18	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017	45
Tabel 19	Unsur - Unsur Survei Kepuasan	47
Tabel 20	Sasaran Kegiatan	49
Tabel 21	Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi	50
Tabel 22	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan	52
Tabel 23	Hasil Penilaian SAKIP	52
Tabel 24	Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategi 3	54
Tabel 25	Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi	54
Tabel 26	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja	58
Tabel 27	Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan	59
Tabel 28	Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2017	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Sofifi	28
Grafik 2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Strategis 2	46
Grafik 3	Perbandingan Capaian Indikator BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi	46
Grafik 4	Perbandingan Target & Presentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	47
Grafik 5	Perbandingan Target & Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2	49
Grafik 6	Capaian Indikator Kinerja BPOM di Mamuju Tahun 2017 ..	50
Grafik 7	Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi	50
Grafik 8	Capaian Indikator Kinerja BPOM Mamuju Tahun 2017	54
Grafik 9	Perbandingan capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi	54

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjabarkan Visi dan Misi organisasi ke dalam tujuan dan sasaran strategis/program/kegiatan Balai POM di Mamuju. Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebagai input kegiatan. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran DIPA tahun 2017 sebesar Rp. 12.413.515.000,- setelah adanya pemotongan (*Selfblocking*) anggaran Balai POM di Mamuju menjadi Rp. 12.037.890.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.077.411.126,- atau 67,10%.

Untuk pencapaian sasaran strategis pertama, "*Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan*", persentase capaian indikator kinerja sasaran dari PK yang ditetapkan yaitu a) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 111,11%; b) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat 125,00%; c) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 113,64%; d) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 128,21%; e) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 98,68%. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan program/kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan adalah: a) Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis 77,58%; b) Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK) 100,00%; c) Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan 187,50% d) Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 102,36% dan e) Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan 112,47%.

Untuk sasaran strategis kedua, "*Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi*

Masyarakat”, persentase capaian indikator kinerja sasaran dari PK yang ditetapkan yaitu: a) Tingkat Kepuasan Masyarakat 55,56%; b) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan 100,00%. Pencapaian sasaran strategis kedua ini didukung oleh program/kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan a) Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju 131,58% dan b) Jumlah komunitas yang diberdayakan 100,00%.

Untuk sasaran strategis ketiga, *“Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Mamuju”*, capaian indikator kinerja sasaran dari PK yang ditetapkan yaitu Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju untuk penilaian TA. 2016 dari inspektorat belum terukur hal ini disebabkan Balai POM di Mamuju mandiri dengan DIPA sendiri pada TA. 2017 sehingga penyusunan LAPKIN pertama kali di lakukan pada periode tahun anggaran 2017 dan untuk penilaiannya di lakukan pada TA. 2018. Pencapaian sasaran ketiga ini didukung oleh program/kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan a) Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar 95,67% dan b) Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu 70,00%. Pada tahun 2017, sebanyak 80,00% kegiatan Balai POM di Mamuju dinilai efisien. Dari 15 *output* kegiatan terdapat 3 kegiatan yang tidak efisien. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai POM di Mamuju yang telah mengimplementasikan *system* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan pencapaian target sasaran dan target kegiatan utama dikarenakan :

1. Pengawasan yang dilakukan secara *timwork* oleh personel Balai POM di Mamuju baik di laboratorium maupun di pemeriksa dan penyidik.
2. Tingkat pemahaman konsumen dan produsen/distributor OMKABA cukup memadai.
3. SDM Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugasnya secara professional.
4. Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor terkait cukup baik.

Sedangkan kendala dalam pencapaian target, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Perencanaan dan evaluasi belum optimal.
2. Pengumpulan data optimal sehingga data *base* yang digunakan belum tepat.
3. Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai Jumlah SDM yang masih sangat terbatas dan disiplin ilmu tertentu yang belum ada.

2017



PENDAHULUAN

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan Prinsip-Prinsip Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas serta Profesionalisme. Hal ini menunjukkan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan instrument pertanggungjawabanyang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAPKIN, dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan Outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja instansi pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

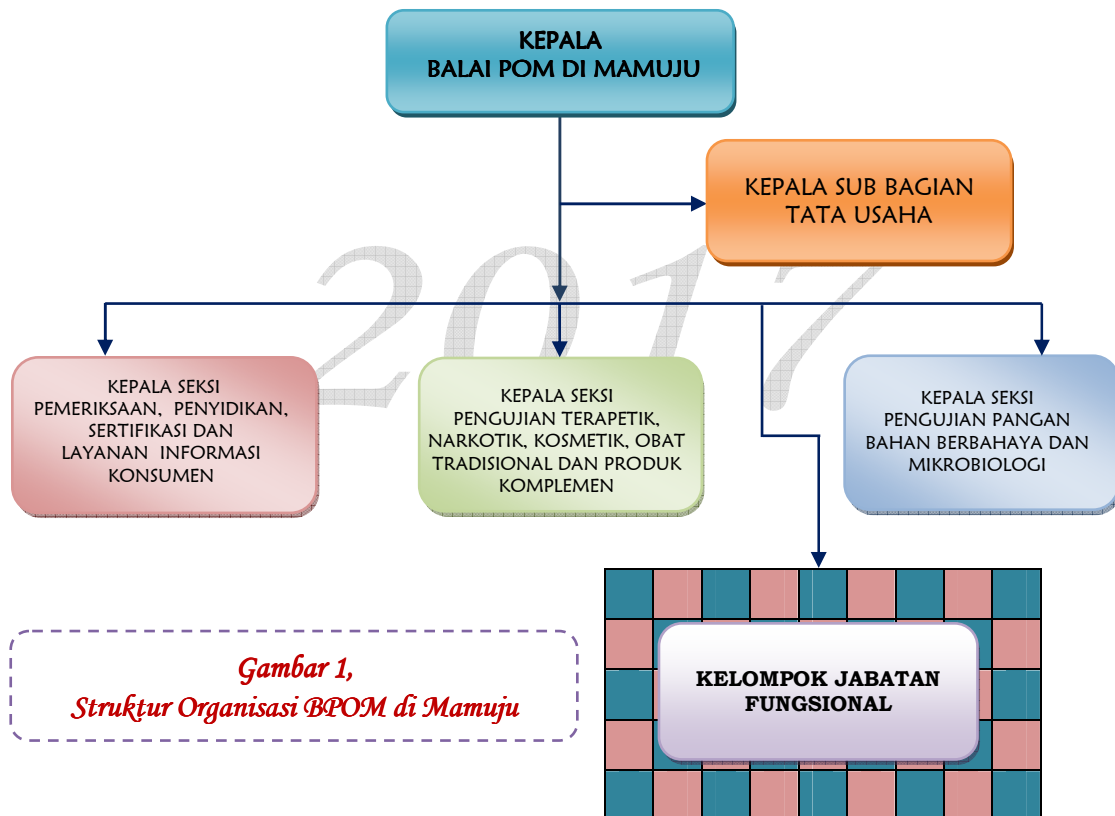
1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan SK Kepala Badan POM No. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Mamuju mempunyai tugas pokok yaitu :



1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM No. 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai POM di Mamuju dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Tugas Pokok masing-masing bagian seperti yang diuraikan berikut ini :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BPOM di Mamuju.

2. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Mempunyai tugas :

pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kesehatan, serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, sikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

➤ Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen;

3. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.

Mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan rencana program, melaksanakan pengujian laboratorium dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya, serta penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

4. Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Mempunyai tugas : Melakukan penyusunan rencana serta program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

5. Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi.

Mempunyai tugas : Melakukan penyusunan rencana serta program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas : Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional yang ada di Balai POM di Mamuju adalah Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM).

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019,

ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*).
2. Pengawasan obat dan makanan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan pusat dan balai.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggung jawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar

negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

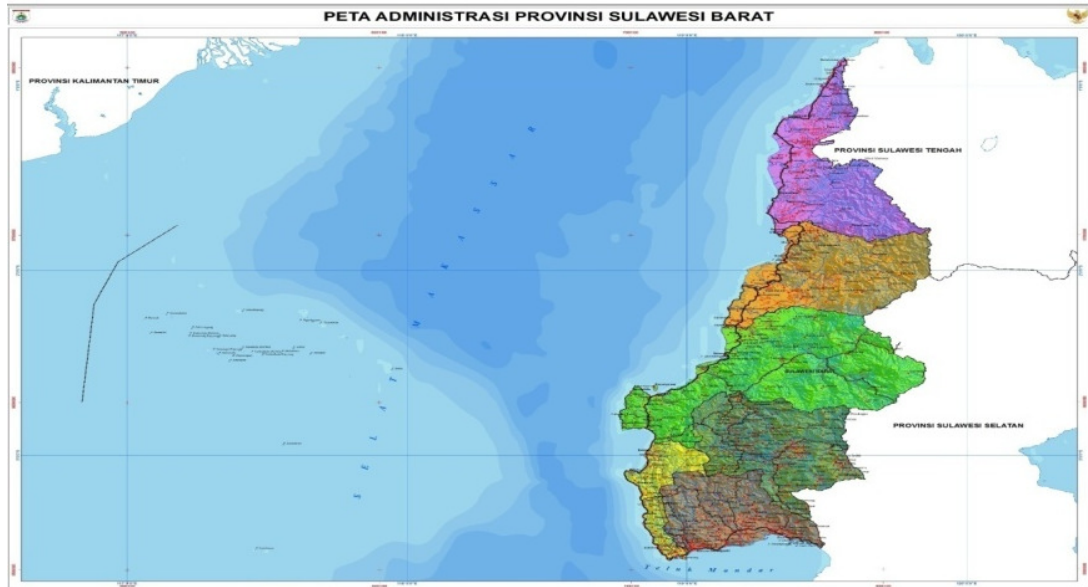
1.4 Analisis Lingkungan Startegis

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri dengan DIPA sendiri dan dalam melaksanakan operasional kegiatan masih memanfaatkan Gedung kantor dengan status sewa/kontrak yang berkedudukan di Jl. Ratulangi No 4 kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, pada periode pelaporan Balai POM di Mamuju telah mempunyai Aset berupa Tanah seluas 9.109 M² di Jalan Poros Kalukku Desa Bambu yang merupakan transfer masuk dari Balai Besar POM di Makassar yang perolehan sebelumnya dari Hibah Pemda Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 dan telah balik nama an. Badan POM dengan status sertifikat nomor 027 pada tahun 2016 .

Diatas tanah tersebut Balai POM di Mamuju rencana akan melakukan pembangunan dengan 3 (Tiga) tahap yaitu tahap pertama pembangunan Gedung Laboratorium Teranokoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi pada tahun 2018, tahap 2 (Dua) pembangunan Gedung Kantor dan Layanan Publik pada tahun 2019, dan tahap 3 (Tiga) adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya pada tahun 2020.

Letak Geografis

*Gambar 2,
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat*



118 ° 43"15" - 119 ° 54"3" : Bujur Timur

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.937.16 km persegi. Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 649 Desa/Kelurahan. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur;
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat;
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama SKPD terkait.

1.5 ISU Strategis Dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai *issu* strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju, dan mengawali kinerja tahun 2017, Balai POM di Mamuju menyusun kegiatan strategis terhadap berbagai *issu* yang ada sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini :



Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kerjanya.

Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain :

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal;
2. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju;
3. Semakin banyak produsen peracik kosmetika rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;
4. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*;
5. Karena tidak adanya Pedagang Besar Farmasi di Wilayah Sulawesi Barat, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendistribusikan obat dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan mobil kanvas tanpa disertai dokumen pengiriman obat;
6. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak;
7. Balai POM di Mamuju saat ini belum mempunyai laboratorium pengujian, sehingga pengujian laboratorium terhadap sampel harus di kerjakan di Balai Besar POM di Makassar.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.



PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2019. Rencana strategis BPOM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) 2017.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi Tahun 2017-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Balai POM di Mamuju untuk mencapainya dalam Tahun 2017.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2017-2019 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan POM RI yang mengacu kepada RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Presiden. Renstra Balai POM di Mamuju berisi visi, misi dan tujuan strategis serta program yang merupakan *instrument* kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Didalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program dan kegiatan Balai POM di

Mamuju yang dilakukan pada periode 2017-2019 dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Target-target kinerja *output* telah ditetapkan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen kinerja Balai POM di Mamuju kepada pemerintah dan akan menjadi kewajiban bersama seluruh jajaran Balai POM di Mamuju untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu dokumen Renstra ini menjadi acuan pada saat menyusun kegiatan tahunan selama periode 2017-2019.



Visi, Misi Dan Tujuan

Visi Balai POM di Mamuju sepenuhnya mengacu kepada Visi BPOM 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu :

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan Pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

➤ **Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai dan mutunya/ nilai gizi terjamin.

➤ **Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Balai POM di Mamuju sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Penjelasan Misi :

Tentang Misi Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut :

➤ **Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko untuk Melindungi Masyarakat.**

Pengawasan obat dan makanan merupakan satu kesatuan fungsi standarisasi yang ditetapkan oleh Badan POM, kegiatan yang komprehensif, yaitu penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum yang dilakukan Balai POM di Mamuju. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus serta mampu mengawalinya selama tiga tahun.

Di satu sisi, tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu, pengawasan obat dan makanan akan di *design* berdasarkan analisis yang mana tujuannya untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

➤ **Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.**

Pelaku Usaha sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk obat dan makanan aman. Mereka merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Mamuju harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. Balai POM di Mamuju harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan diharapkan nantinya pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.

Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2012 menunjukkan *trend* yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan obat dan makanan, utamanya pada sisi *demand*. Sebagai salah satu pilar pengawasan obat dan makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi obyek upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) untuk memilih obat dan makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait obat dan makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Menyadari adanya kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat, Balai POM di Mamuju melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain. Di sisi lain arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri, karena masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenal syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan *asymmetric information* yang dapat dimanfaatkan produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun *substandar*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan obat dan makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan diselenggarakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan

Balai POM di Mamuju bersinergi dengan Lintas Sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

➤ **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPOM**

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai POM di Mamuju harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Misi Balai POM di Mamuju merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Mamuju. Pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang berstandar nasional/internasional diterapkan dalam memperkuat Balai POM di Mamuju menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu maka Balai POM di Mamuju perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

➤ **Budaya Organisasi**

Budaya Organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi;
2. Integritas
Konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional;
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik;
5. Inovatif
Mampu melakukan Pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terkini;
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

➤ **Tujuan Organisasi**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan atau Indikator Kinerja tujuan tersebut adalah Tingkat Kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Balai POM di Mamuju.
2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Untuk mewujudkan visi, misi, serta menerapkannya, Balai POM di Mamuju telah menyusun sasaran strategis periode 2017-2019 dengan mempertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sasaran strategis yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019 sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Periode 2017-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepuasan masyarakat ▪ Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM di Mamuju		Meningkatkan Kualitas kapasitas kelembagaan BPOM di Mamuju	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM

Sasaran Strategi 1

“Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Mamuju merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten dan terstandar. Pengawasan ini

melibatkan Balai Besar/ Balai POM di 33 provinsi, termasuk Balai POM di Mamuju.

Pengukuran terhadap sasaran strategis ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator, yang terdiri dari :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 90 %.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 80 %.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 88 %.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 78 %.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 80 %.



Sasaran Strategi 2

"Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat"

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (Aman, Khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan advokasi dan edukasi kepada pelaku usaha serta pendampingan *regulatory*. Masing-masing bidang di Balai POM di Mamuju mempunyai upaya yang berbeda dalam memberikan dukungan *regulatory*, sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Mamuju belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja maka Balai POM di Mamuju senantiasa melakukan evaluasi terhadap semua program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung perencanaan kegiatan selanjutnya. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk

masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai POM di Mamuju.

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MOU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, Balai POM di Mamuju perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, terkait dengan sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi dan Edukasi (KIE).



Sasaran Strategi 3

"Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Mamuju"

Sejalan dengan aturan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai POM di Mamuju berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (Delapan) area perubahan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel dalam melayani masyarakat dan berkinerja tinggi sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2017-2019, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2017 – 2019

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2017	2018	2019
1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	93,00	94,00
	2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	83,00	85,00
	3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88,00	92,00	95,00
	4 Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	83,00
	5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	83,00	85,00
2 Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	1 Tingkat kepuasan masyarakat	60,00	65,00	70,00
	2 Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	2,00	4,00	6,00
3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	1 Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM	A	A	A
1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513,00	513,00	513,00
	2 Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	100,00	100,00
2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	7,41	7,41	8,33
3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	13,77	13,77	15,11
4 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	1 Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	1,00	1,00	2,00
1 Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BPOM	19,00	19,00	25,00
	2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	2,00	4,00	6,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	30,00	30,00	35,00
1 Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	9,00	9,00

Tabel 3.
Defenisi operasional dari Indikator Kinerja Periode 2017-2019

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Obat yang mendapat Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan POM RI. • Yang dimaksud dengan Obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika (termasuk Obat Tradisional). • Obat memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. • Kategori Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat & Makanan. • Jumlah produk Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dihitung berdasarkan satuan bets.
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Obat Tradisional yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM. • Obat Tradisional memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. • Kategori obat Tradisional yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan.
Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Kosmetika yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM • Kosmetika memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. • Kategori kosmetika yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan.
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Suplemen Kesehatan yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM • Suplemen Kesehatan memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. • Kategori Suplemen Kesehatan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan.
Tingkat Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. • Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014). • Target dinyatakan dalam angka.
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur. • Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. • Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. • Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Nilai SAKIP Balai POM	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APPI Badan POM.

Penetapan target indikator kinerja kegiatan Balai POM di Mamuju pada 3 sasaran strategis periode 2017 sampai 2019 ditetapkan berdasarkan :

- Target Capaian Kinerja BBPOM di Makassar periode 2015-2019 dengan pertimbangan : sampai periode 2016 pengawasan obat dan makanan wilayah propinsi Sulawesi Barat masuk dalam *Catchment area* BBPOM di Makassar yaitu SULSELBAR (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat), Target Capaian Kinerja yang dimaksud terdiri dari :
 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
 - Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
- Target Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi periode 2015-2019 dengan pertimbangan : Balai POM di Sofifi merupakan Balai Baru yang terbentuk sebelum Balai POM di Mamuju dengan Cakupan Wilayah dan SDM yang dimiliki tidak berbeda jauh dengan Balai POM di Mamuju. Target Capaian Kinerja yang dimaksud terdiri dari :
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
 - Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
 - Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
 - Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
 - Jumlah Perkara dibidang obat dan makanan
 - Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju Jumlah Komunitas yang diberdayakan.

2.2 Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai

pemberi amanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2017 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BALAI POM DIMAMUJU			
NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS			
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		2 Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	80
		3 Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	88
		4 Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78
		5 Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	60
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	3 Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya Kualitas sarana	3 Persentase cakupan pengawasan sarana	7,41

	produksi yang memenuhi standar		produksi Obat dan Makanan	
3	Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan Makanan	1
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30 %
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulanan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat rencana aksi Perjanjian Kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan laporan kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi per triwulan.

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja :






Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus

$$:\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

Tabel 5.
Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017

Kriteria	Capaian Target Indikator	
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$	
Baik	100%	
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$	
Kurang	$\chi < 75\%$	
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- *Me-review* penetapan target kinerja tahunan;



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI telah melaksanakan tugas utama. Ada 3 (Tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun Anggaran 2017 dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dan 6 (enam) diantaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Balai POM di Mamuju seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut :

Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju

*Tabel 6.
Capaian Sasaran Strategis*




SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	114,33	MEMUASKAN
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	82,40	CUKUP
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	-	BELUM ADA PENGUKURAN

Keberhasilan pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diukur dengan 6 indikator, yaitu:




1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Adapun target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Mamuju dapat dijelaskan dalam sebagai berikut :

*Tabel 7.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Mamuju*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	 Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	100,00	125,00	
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88,00	100,00	113,64	
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	78,00	100,00	128,21	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	78,95	98,68	 Cukup
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60,00	55,56	92,60	 Cukup

*Tabel 8.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	 Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	100,00	125,00	
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88,00	100,00	113,64	
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	78,00	100,00	128,21	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	78,95	98,68	 Cukup
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60,00	55,56	92,60	 Cukup

Capaian Indikator Sasaran Strategis - 1

"Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 1 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap 5 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Tabel 9.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPOM di Mamuju Tahun 2017

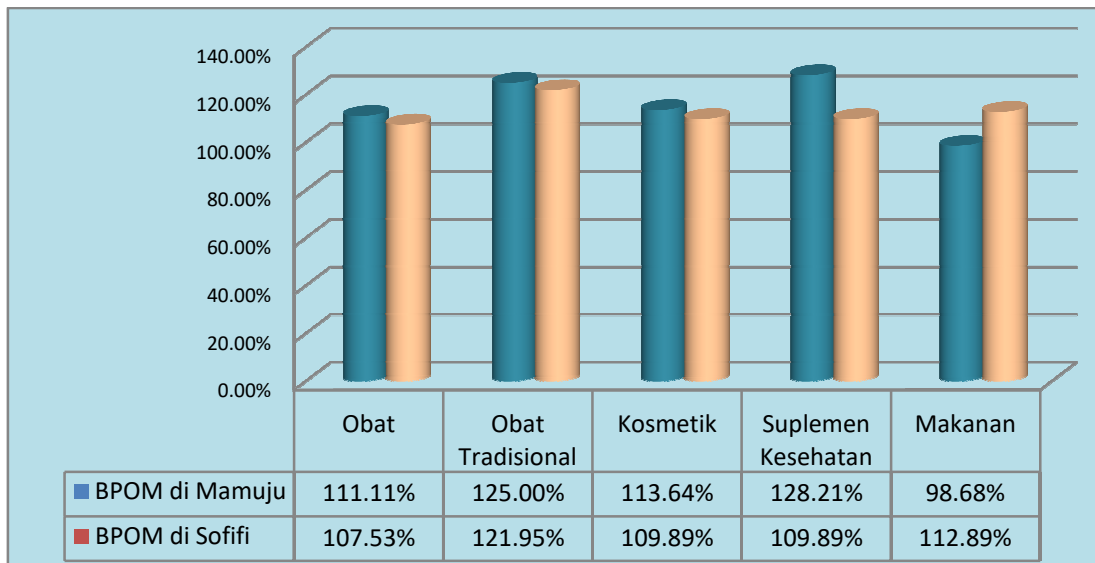
Sasaran Strategis 1 :		Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
Persentase obat yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11	 Memuaskan	
Persentase obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	80	100	125.00		
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	88	100	113.64		
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	78	100	128.21		
Persentase makanan yang Memenuhi Syarat	80	78.95	98.68		
Rata-rata			114,33 %		

Tabel 10.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi

Sasaran Strategis 1 :		Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
Indikator Kinerja	BPOM di Mamuju			BPOM di Sofifi		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase obat yang Memenuhi Syarat	90%	100 %	111.11%	93%	100 %	107,53%
Persentase obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	80%	100 %	125.00%	82%	100 %	121,95%
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	88 %	100 %	113.64%	91 %	100 %	109,89%
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	78 %	100 %	128.21%	91 %	100 %	109,89%
Persentase makanan yang Memenuhi Syarat	80 %	78.95 %	98.68%	88,60 %	100 %	112,87%
Rata-rata			114,33 %			112,43

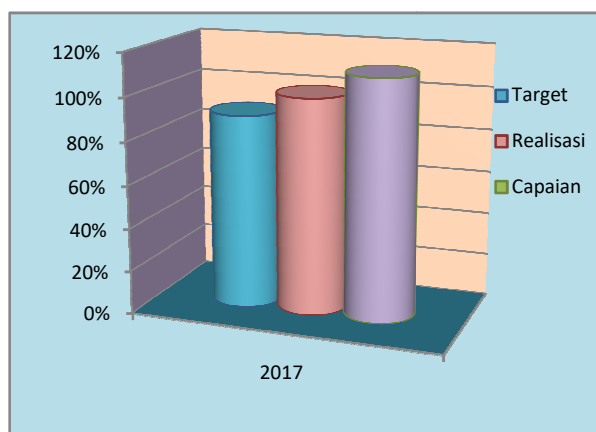
Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Sofifi



Persentase capaian kinerja 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1 tahun 2017 berkisar antara 98,68% s/d 128,21%. Kelima indikator kinerja yang diukur di atas rata-rata memperoleh kriteria “Memuaskan”. Perhitungan dilakukan hanya pada produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang mempunyai Nomor Ijin Edar (NIE) atau Notifikasi dari Badan POM dan memenuhi syarat yang ditetapkan melalui pengujian laboratorium sesuai definisi operasional pada Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2017.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 100% dihitung dari perbandingan jumlah produk obat yang memenuhi syarat (43 sampel) terhadap jumlah seluruh produk obat yang diuji dengan parameter kritis (43 sampel). Produk obat yang diuji meliputi



obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika serta ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. Pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dan tidak terlepas dari upaya Balai

POM di Mamuju dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, yang antara lain melalui :

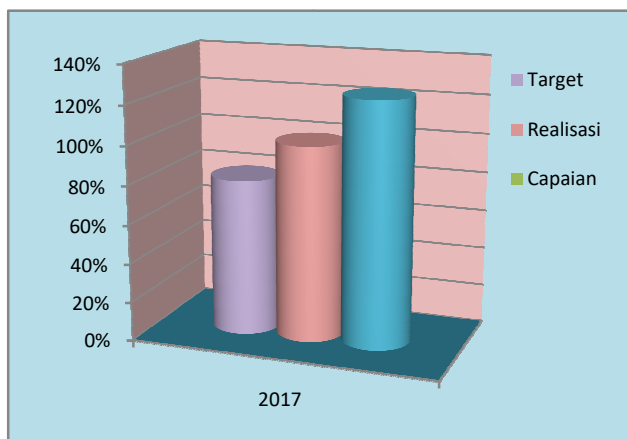
- Pemberian sanksi administratif maupun *projustitia* kepada sarana distribusi resmi dan tidak resmi yang menjual bebas produk obat keras tanpa hak dan kewenangan.
- Melakukan KIE kepada masyarakat melalui kegiatan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, pelajar, organisasi pemuda, Ibu-ibu PKK, dan dharmawanita dan diharapkan dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan dimana mereka berada.

Untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat yang sampai kepada masyarakat tetap baik, maka perlu dilakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat, agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) secara konsisten.

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% jumlah sampel obat yang memenuhi syarat, akan tetapi persentase capaian untuk indikator kinerja Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 111,11% dari Balai POM di Sofifi 107,53% hal ini disebabkan karena target capaian Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 90 % sedangkan Balai POM di Sofifi 93% . Capaian Indikator jumlah sampel obat yang memenuhi syarat Balai POM di Mamuju adalah 100 % dari 43 sampel yang selesai uji, sedangkan capaian Balai POM di Sofifi 100 % dari 24 item sampel yang selesai uji.

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Persentase realisasi Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017



adalah 80% dengan nilai capaian 125,0%. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk obat tradisional yang memenuhi syarat (71 sampel) terhadap jumlah seluruh produk obat tradisional yang diuji dengan parameter

kritis (71 sampel) dilaboratorium Pengujian Balai Besar POM di Makassar.

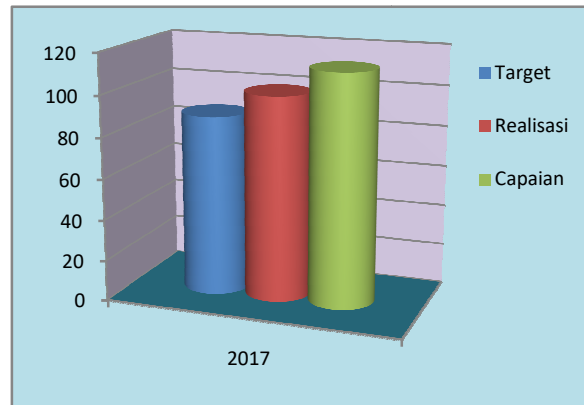
Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran memproduksi dan/atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki ijin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI (*Public Warning* Badan POM RI);
- Pengawasan terhadap pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat;
- Penyebaran informasi dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik yang intensif oleh Balai POM di Mamuju kepada masyarakat tentang obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat, serta mensosialisasikan cara untuk mengetahui produk yang telah terdaftar di Badan POM RI dengan mengakses situs web *www.ceknie.pom.go.id*;
- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran obat tradisional bersama pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan berfokus pada pemutusan mata rantai peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki ijin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI.

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% jumlah sampel obat tradisional yang memenuhi syarat, akan tetapi persentase capaian untuk indikator kinerja Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 125% dari Balai POM di Sofifi 121,95% hal ini disebabkan karena target capaian Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 80 % sedangkan Balai POM di Sofifi 82%. Capaian Indikator jumlah sampel obat yang memenuhi syarat Balai POM di Mamuju adalah 100 % dari 71 sampel yang selesai uji, sedangkan capaian Balai POM di Sofifi 100 % dari 10 item sampel yang selesai uji.

3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai POM di Mamuju tahun 2017 adalah sebesar 88 %, dengan nilai capaian sebesar 113,64 %. Pengukuran indikator ini



dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk kosmetik yang memenuhi syarat (116 sampel) terhadap jumlah seluruh produk kosmetika yang diuji berdasarkan parameter kritis (116 sampel) di laboratorium pengujian Balai Besar POM di Makassar.

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2017 sebesar 113,64%. Meskipun Balai POM di Mamuju sudah berhasil mencapai target persentase kosmetik yang memenuhi syarat, namun untuk menurunkan angka kosmetik yang tidak memenuhi syarat diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

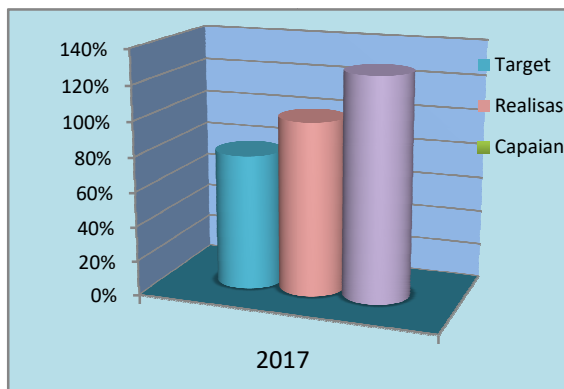
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetika dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mencerahkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetika tanpa ijin edar (*illegal*) baik impor maupun lokal;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetika baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kosmetika yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;
- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar dan yang sudah ditarik dari peredaran berdasarkan *Public Warning* Badan POM RI;

- Penyebaran informasi dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;
- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM RI;
- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Melakukan Operasi Terpadu dengan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI khusus untuk komoditi kosmetika.

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat, akan tetapi persentase capaian untuk indikator kinerja Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 113,64% dari Balai POM di Sofifi 109,89% hal ini disebabkan karena target capaian Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 88 % sedangkan Balai POM di Sofifi 91% . Capaian Indikator jumlah sampel obat yang memenuhi syarat Balai POM di Mamuju adalah 100 % dari 116 sampel yang selesai uji, sedangkan capaian Balai POM di Sofifi 100 % dari 19 item sampel yang selesai uji.

1. Capaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai POM di Mamuju tahun 2017 adalah sebesar 78%, dengan nilai capaian sebesar 128,21%. Pengukuran indikator ini dilakukan



berdasarkan perbandingan jumlah produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat (16 sampel) terhadap jumlah seluruh produk Suplemen Kesehatan yang diuji berdasarkan parameter kritis (16 sampel) di Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Makassar.

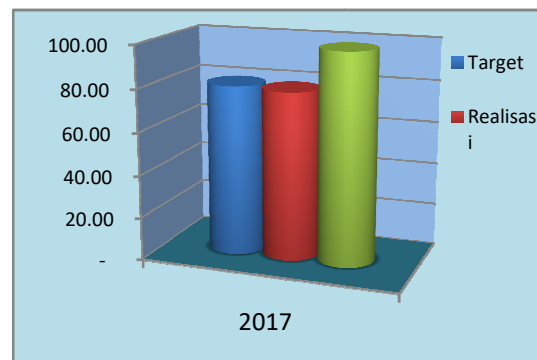
Meskipun Balai POM di Mamuju sudah berhasil mencapai target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 128,21%, namun untuk menurunkan angka peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi standar dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha baik produsen maupun distributor Suplemen Kesehatan yang masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar produk yang beredar memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat.
- Penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi yang melakukan pelanggaran.
- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk Suplemen Kesehatan yang diterbitkan oleh Badan POM RI.

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat, akan tetapi persentase capaian untuk indikator kinerja Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 128,21% dari Balai POM di Sofifi 109,89% hal ini disebabkan karena target capaian Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 78 % sedangkan Balai POM di Sofifi 91%. Capaian Indikator jumlah sampel obat yang memenuhi syarat Balai POM di Mamuju adalah 100 % dari 16 sampel yang selesai uji, sedangkan capaian Balai POM di Sofifi 100 % dari 2 item sampel yang selesai uji.

2. Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Realisasi Presentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai POM di Mamuju tahun 2017 adalah sebesar 78,95 % dengan nilai capaian sebesar 98,68 %. Pengukuran indikator ini



dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk makanan yang memenuhi syarat (120 sampel) terhadap jumlah seluruh produk makanan yang diuji berdasarkan parameter kritis (152 sampel) di laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Makassar, jadi terdapat 32 sampel pangan yang tidak memenuhi syarat terdiri dari sampel rutin PJAS, Industri Rumah Tangga, dan MD yang positif mengandung Pewarna yang dilarang untuk pangan (pewarna *tekstil*), Pengawet yang dilarang dalam pangan (Formalin), Bahan Tambahan Pangan (pengawet dan pemanis) melebihi batas yang ditentukan serta positif mengandung Pemanis tanpa mencantumkan pada label, Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat adalah :

- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan melibatkan komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga (IRTP), Ritail, PKK dan Kader Keamanan Pangan Desa.
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredar akan mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar;

Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre market* dan *post market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat;

- Penerapan sanksi administrasi maupun *Projustitia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 78,95 % dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% ,sehingga persentase capaian untuk indikator kinerja Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 98,68% dari target 80% dibandingkan Balai POM di Sofifi 112,87% dari target 88,60%, hal ini disebabkan karena dari 152 sampel yang selesai uji Balai POM di Mamuju, 120 sampel yang memenuhi syarat dan 32 sampel yang

tidak memenuhi syarat (sampling dilakukan berbasis resiko) sedangkan Balai POM di Sofifi Capaian Indikator ini 100 % dari 99 sampel yang selesai uji (semua memenuhi syarat).

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis - 1

Sasaran Program

(1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 11.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPOM di Mamuju

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513	398	77,58
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	10	10	100
Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	13,89	187,43
Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	15,49	112,47
Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	1	1	100

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi

Sasaran Strategis 1 :	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
	BPOM di Mamuju			BPOM di Sofifi		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513	398	77,58	503	154	30,62
Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	10	10	100	30	34	113,33
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	13,89	187,43	11,35	2,59	22,85
Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	15,49	112,47	4,36	3,22	73,78
Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	1	1	100,00	1	0	0
Rata-rata			114,33			112,43

❖ **Sasaran Kegiatan 1 :**

“Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar”

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK). Berikut tabel Realisasi Sampling dan Pengujian Tahun 2017 :

*Tabel 13.
Realisasi Sampling dan Pengujian Tahun 2017*

Jenis Sampel	Sampling		Hasil Uji		
	Target	Realisasi	MS	TMS	HPST
Obat	99	99	36	-	-
Narkotika, Psikotropika, Prekursor	10	10	7	-	-
Obat Tradisional	76	76	71	-	-
Kosmetik	153	153	116	-	-
Suplemen Makanan	25	25	16	-	-
Makanan :				-	-
Pangan rutin	87	87	67	20	-
Kemasan Pangan	5	5	5	-	-
Pangan SNI Wajib	16	16	6	10	-
Pangan bertarget	26	26	26	-	-
PJAS	16	18	16	2	-
Jumlah	513	515	366	32	

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Target sampel pada tahun 2017 adalah 513 sampel, dan terealisasi sebanyak 398 sampel atau 77,58 %. Realisasi sampling dan hasil uji dapat dilihat pada tabel 12 Sampel diuji menggunakan parameter kritis yaitu parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat dan mutu produk yang diuji. Parameter kritis ini ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan.

Realisasi di atas menunjukkan capaian target sampling dan pengujian yang telah dilakukan, namun terdapat sejumlah sampel produk Obat (66 sampel), Obat Tradisional (5 sampel), Kosmetika (37 sampel) dan Suplemen Kesehatan (9 sampel) yang pengujiannya belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2017 (*carry over*).

Sampel produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan yang *carry over* diakibatkan adanya beberapa kendala yang terjadi selama proses pengujian di laboratorium, diantaranya :

- Balai POM di Mamuju belum mempunyai fasilitas laboratorium pengujian sehingga untuk melaksanakan fungsi pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Makassar terutama sampel yang menggunakan alat laboratorium seperti HPLC dan GC bergantung pada operator penanggungjawab alat tersebut;
- Terjadinya kerusakan pada instrumen di Laboratorium Pengujian Obat, Kosmetika, dan Obat Tradisional selama proses pengujian tahun 2017 yang menyebabkan terjadinya *overload* pengujian, karena Laboratorium Teranakoko Balai Besar POM di Makassar sedang dilakukan renovasi sehingga pelaksanaan pengujian tidak dapat dilakukan secara optimal;
- Pelaksanaan kegiatan sampling untuk komoditi Kosmetika dan Suplemen Kesehatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena dilakukannya revisi yang telah dibuat di awal tahun setelah diberlakukannya Pedoman Sampling Tahun 2017, sehingga target sampling yang tidak dapat dicapai pada awal tahun, diperoleh pertengahan tahun. Hal ini mengakibatkan penumpukan jumlah sampel pada akhir tahun yang melebihi kapasitas pengujian;
- Minimnya SDM di pengujian pada Balai POM di Mamuju menyebabkan ada beberapa item sampel yang tidak diuji ditahun 2017 (*carry over*).

Realisasi capaian indikator kinerja ini lebih besar yaitu 77,58% dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 30,62% . Target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada Balai POM di Mamuju adalah 513 sampel dan realisasi 398 sampel dibandingkan dengan target untuk indikator yang sama pada Balai POM di Sofifi adalah 503 sampel dan realisasi 154 sampel.

2. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)

Indikator Kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah sampel yang disampling pada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dibandingkan dengan target sampel yang harus di sampling di IFK. Target dari indikator ini adalah 10 sampel dan terealisasi sebanyak 10 sampel atau sebesar 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi mutu obat, khususnya yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat melalui Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat.

Realisasi sampling obat di sektor publik sangat tergantung dengan stok Obat pada saat dikunjungi oleh petugas, sehingga seringkali tidak sesuai dengan perencanaan baik dari segi jumlah, jenis, maupun waktu pelaksanaannya. Pemetaan IFK dilakukan di seluruh kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah 6 kabupaten dengan rata-rata ketersediaan Obat yang terdapat di sarana adalah 90%.

Perencanaan sampling Produk Terapetik di tahun 2017 berdasarkan sistem *random* atau sampel acak 50% (92 sampel) dan sampling tertentu/*targeted* sebanyak 17 sampel. Untuk sampling acak atau *random* terdiri dari 2 (Dua) sektor yaitu sampel e-katalog sebanyak 46 sampel dan non e-katalog sebanyak 46 sampel dan terdiri dari 13 kelas terapi meliputi :

1. Antibiotik
2. Kardiovaskular
3. Obat Saluran Pernafasan
4. Analgetik, Antipiretik, Antiinflamasi, Antihistamin
5. NAPZA dan Antipsikosis lain termasuk antiepileptik
6. Metabolisme (Antidiabetes, Diuretik, dan Antikolesterol)
7. Obat Saluran Pencernaan
8. Antimalaria
9. Antiviral, Antiprotozoa, Antelmintik dan Antifungi
10. Dermatologi
11. Hormon Kontrasepsi (Obat KB)
12. Vaksin dan Serum
13. Lain - lain

Untuk sampling tertentu/*targeted* terdiri dari 3 target meliputi :

1. Target sampling di sarana produksi, PBF, dan IFK.
2. Target sampling *triggered* sampel.
3. Target sampling rokok, ruang lingkup, dll.

Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menyampling kategori lain bilamana ditemukan di IFK tersebut. Pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan telah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan untuk membantu petugas dari Balai POM di Mamuju pada saat melakukan sampling di IFK.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 100% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 113,33% Target untuk Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten) di Balai POM di Mamuju adalah 100% terdiri dari 10 sampel dan pada akhir periode pelaporan realisasi 10 sampel sehingga persentase capaian adalah 100 % sedangkan pada Balai POM di Sofifi target dari pemenuhan target sampling produk obat disektor *public* adalah 30% dan realisasi pada akhir priode pelaporan adalah 34 % sehingga persentase capaian melebihi target.

❖ **Sasaran Kegiatan 2**

"Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Yang Memenuhi Standar"

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Berikut tabel Data sarana dan cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Tahun 2017.

Tabel 14.

Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat

SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA	
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA
Obat	0	0
Obat Tradisional	0	0
Kosmetika	0	0
Pangan MD	2	2
Pangan IRTP	214	28
Jumlah	216	30

1. Persentase cakupan sarana produksi Obat dan Makanan.

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan dihitung dari Persentase sarana produksi yang diperiksa dari sarana produksi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan target persentase cakupan pengawasan sarana produksi yang ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan. Sarana produksi

yang ada di Provinsi Sulawesi Barat masih terbatas pada sarana produksi pangan, dan target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar 7,41% yaitu 16 sarana produksi yang diperiksa dari 216 sarana produksi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 13,89% yaitu 30 sarana produksi yang diperiksa dari 216 sarana produksi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sehingga persentase capaian sebesar 187,43%.

Realisasi Capaian target cakupan sarana produksi obat dan makanan Balai POM di Mamuju pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja hal ini disebabkan oleh :

- Rendahnya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja karena saat penetapan target, Balai POM di Mamuju belum mempunyai *baseline* data yang tepat sehingga target yang ditetapkan mengacu pada target capaian BPOM di Sofifi.
- Adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembinaan berupa Bimbingan Tehnis, pendampingan dan percepatan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT) serta adanya Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) khususnya komunitas Industri Rumah Tangga pada triwulan IV menyebabkan realisasi capaian target cakupan pengawasan sarana produksi melebihi.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Me-review* kembali target capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
2. Pemutakhiran data sarana produksi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Sulawesi Barat
3. Lebih cermat dalam perencanaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

❖ **Sasaran Kegiatan 3**

"Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Yang Memenuhi Standar"

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan makanan. Berikut tabel data sarana dan cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Sulawesi Barat Tahun 2017 :

Tabel 15.

Data Sarana Dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2017

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA	
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA
GFK	7	2
Apotek	102	25
Toko Obat	38	4
Rumah Sakit	10	4
Puskesmas	97	6
Balai Pengobatan/Klinik	21	-
PBF	0	-
Sarana Distribusi Obat/Obat Tradisional	25	-
Sarana Distribusi Kosmetik	99	-
Sarana Distribusi Pangan	647	121

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih besar yaitu 187,43% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 22,85% (berdasarkan RAPK) dan 112,50% (berdasarkan RKAKL) Target cakupan pengawasan sarana produksi di Balai POM di Mamuju adalah 7,41% terdiri dari 16 sarana produksi yang diperiksa terhadap 216 sarana yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, pada akhir periode pelaporan jumlah sarana produksi yg diperiksa adalah 30 sarana sehingga capaian indikator ini melebihi dari target yg ditetapkan, sedangkan pada Balai POM di Sofifi pada periode yang sama cakupan pengawasan sarana produksi adalah 18 sarana dan target yang ditetapkan di RKAKL adalah 16 sarana sehingga capaian untuk indikator ini adalah 112,50% (berdasarkan RKAKL).

1. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dihitung dari Persentase sarana distribusi yang diperiksa dari sarana distribusi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan target persentase cakupan pengawasan sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. Target dari indikator kegiatan ini adalah 13,77% dengan realisasi 15,49% dari 1.046 sarana distribusi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Persentase Capaian dari kegiatan

ini sebesar 112,47%. Cakupan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana distribusi Obat dan NAPZA sebanyak 274 sarana dengan hasil 41 sarana yang tidak memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan fisik bangunan serta masih ada 249 sarana yang belum pernah dilakukan pengawasan sarana;
- 2) Sarana distribusi Obat Tradisional sebanyak 26 dan petugas Balai POM di Mamuju belum pernah melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional;
- 3) Sarana Kosmetika sebanyak 99, namun petugas Balai POM di Mamuju belum pernah melakukan pemeriksaan sarana distribusi Kosmetika;
- 4) Sarana distribusi Pangan sebanyak 647 sarana yang terdiri dari 121 sarana pangan yang telah diperiksa dengan hasil 112 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dan 9 sarana yang sudah memenuhi ketentuan.

Ada beberapa sarana distribusi yang berada di kabupaten dengan kondisi geografis masih sulit dijangkau karena jarak tempuh yang jauh dan sarana transportasi belum memadai, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengawasan pada sarana didaerah tersebut.

Realisasi capaian target cakupan sarana distribusi obat dan makanan Balai POM di Mamuju pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja hal ini disebabkan oleh rendahnya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja karena saat penetapan target, Balai POM di Mamuju belum mempunyai *baseline* data yang tepat sehingga target yang ditetapkan mengacu pada target capaian BPOM di Sofifi.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk menyelaraskan target dengan realisasi, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- *Me-review* kembali target capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
- Melakukan pemutakhiran data sarana distribusi langsung pada *stakeholder* terkait di 6 (enam) kabupaten.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih besar yaitu 112,47% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 73,78% (berdasarkan RAPK) dan 104,17% (berdasarkan RKAKL) Target cakupan pengawasan sarana distribusi di Balai POM di Mamuju adalah 13,77% terdiri dari 144 sarana distribusi yang diperiksa

terhadap 1.046 sarana yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, pada akhir periode pelaporan cakupan pengawasan sarana distribusi adalah 162 sarana dari 144 sarana yang ada di wilayah Sulawesi Barat sehingga capaian indikator ini melebihi dari target yg ditetapkan, sedangkan pada Balai POM di Sofifi pada akhir periode pelaporan cakupan pengawasan sarana distribusi adalah 150 sarana dan target yang ditetapkan di RKAKL adalah 144 sarana sehingga capaian untuk indikator ini adalah 104,17% (berdasarkan RKAKL).

❖ **Sasaran Kegiatan 4**

“Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan”

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan 1 indikator kinerja, yaitu Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan, pengukuran terhadap indikator kegiatan ini adalah berdasarkan pada jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara *projustitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS. Berikut tabel Realisasi Indikator Kegiatan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju Tahun 2017 :

Tabel 16.

Realisasi Indikator Kegiatan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju Tahun 2017

No.	Produk	Jumlah Perkara	Tindak Lanjut	
			Non SPDP	<i>Pro justitia</i>
1	Obat	1	0	1
2	Obat Tradisional	0	0	0
3	Kosmetika	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	0	0	0
5	Makanan	0	0	0
Total		1	0	1

Pada tahun 2017 pencapaian target kinerja unuk indikator sasaran kegiatan 4 yaitu jumlah perkara dibidang obat dan makanan adalah 100% dari taget yang ditetapkan sebanyak 1 perkara capaian perkara tersebut dari kasus di Kabupaten Polman dibidang Obat dimana pada proses penyidikan telah ditetapkan 2 (dua) orang sebagai tersangka dan dibuat dalam 1 (satu) berkas perkara, namun setelah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan

Negeri Kabupaten Polman (Tahap 1) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi petunjuk (P19) agar berkas dijadikan 2 (dua) / di-split untuk masing-masing tersangka sehingga output dari kegiatan penyidikan atas 1 (satu) perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Mamuju menjadi 2 (dua) berkas perkara.

Tercapainya realisasi untuk indikator kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain

1. Kooperatifnya *informan* yang memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana di Bidang Farmasi;
2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Korwas PPNS/Polri, melalui *joint operation* pada kegiatan Operasi Penindakan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan;
- Kuantitas personil yang melakukan penyidikan masih sangat kurang, PPNS yang ada berjumlah 1 (satu) orang, sehingga kegiatan penyidikan berupa investigasi awal, operasi penindakan dan pemberkasan perkara dilakukan oleh petugas yang sama;
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen;
- Koordinasi yang lebih *intens* dengan unsur *Criminal Justice System* di daerah;
- Perlunya penambahan petugas (baik PPNS maupun intelijen), fasilitas transportasi, perlengkapan dan penunjang pelaksanaan investigasi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain :

- Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui rekrutmen pegawai;
- Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau *workshop*, pertemuan investigasi awal dan penyegaran proses penyidikan;
- Meningkatkan koordinasi antar PPNS Badan POM RI, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing balai sebagai bahan pembandingan pada kegiatan investigasi awal dan operasi penindakan maupun dalam proses penyidikan.
- Konsultasi dengan Badan POM RI khususnya Deputi di Bidang Penindakan.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih besar yaitu 100% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 0% terhadap jumlah target yang sama yaitu 1 perkara.


Capaian Indikator Sasaran Strategis - 2

"Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan"

Sasaran Strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat (merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama) dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan mengalokasikan anggaran pada DIPA masing-masing SKPD terkait.

Tabel 17.

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

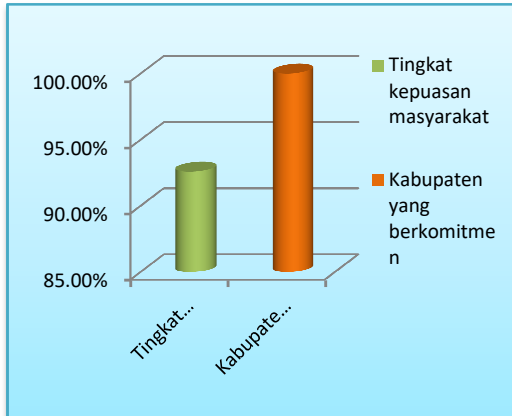
Sasaran strategis 2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	55,56	92,59	 Cukup
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	2	100	
Rata – Rata			96,30 %	

Tabel 18.

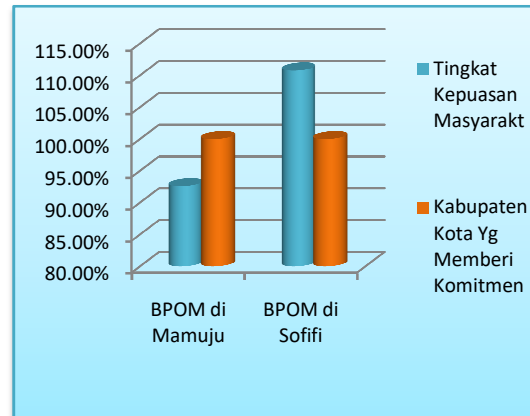
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

Sasaran Strategis 2:	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan					
Indikator Kegiatan	BPOM di Mamuju			BPOM di Sofifi		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	55,56	92,59	65	72	110,77
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	2	100%	1	1	100

Grafik 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Strategis 2



Grafik 3. Perbandingan Capaian Indikator BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi



1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada pedoman PERMENPAN No. 16 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Adapun cara penilaian IKM sebagai berikut :

Detractor			Passive				Promoter		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Score	%	Score
Promoter	=	X	A %
Passive	=	Y	B %
Detractor	=	Z	C %

NPS : (A - C) %

- *Promoter* = Jumlah responden yang memberikan Score 9 atau 10 (pelanggan yang memiliki/memberikan kecenderungan paling tinggi untuk menghubungi ULPK kembali dan 80% rekomendasi umumnya datang dari pelanggan jenis ini.
- *Passive* = Jumlah responden yang memberikan Score 7 atau 8 (repurchase dan referral ratekelompok pelanggan ini jauh lebih rendah dari promoter) jenis pelanggan ini mungkin tidak panda, namun begitu ada unit/lembaga lain yang lebih bagusserta merta mereka akan pindah.
- *Detractor* = Jumlah responden yang memberikan score 0 sampai 6 (kelompok pelanggan ini menyumbang 80% dari komentar negative terhadap ULPK).

- NPS Positif (+) = Pelanggan akan merekomendasikan ULPK kepada Masyarakat.
- NPS Negatif (-) = Pelanggan tidak akan merekomendasikan ULPK kepada masyarakat.

Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di *catchment area* Balai POM di Mamuju sebesar 92,59 % dari target nilai IKM sebesar 60% dengan jumlah responden sebanyak 18 responden (10 responden memberi penilaian 9 -10 dan 8 responden memberi penilaian 7-8) dengan mayoritas merupakan pelanggan yang memanfaatkan layanan di ULPK.

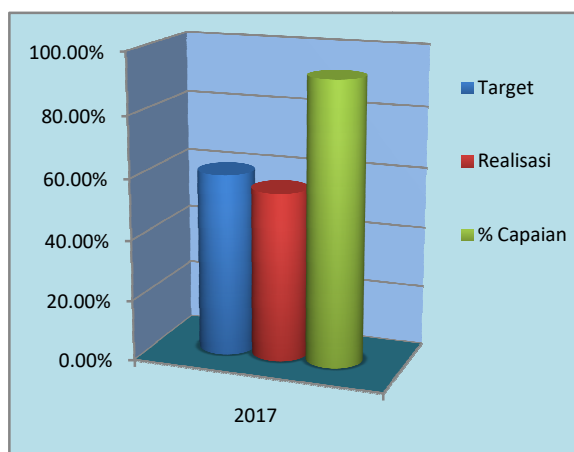
Adapun unsur-unsur dalam survei kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Unsur – Unsur Survei Kepuasan

Prosedur Pelayanan	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Persyaratan Pelayanan	Kesopanan dan Keramahtamahan Petugas
Kejelasan Petugas Pelayanan	Kewajaran Biaya Pelayanan
Kedisiplinan Petugas Pelayanan	Kepastian Biaya Pelayanan
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	Kepastian Jadwal Pelayanan
Kemampuan Petugas Pelayanan	Kenyamanan Lingkungan
Kecepatan Pelayanan	Keamanan Pelayanan

Grafik 4. Perbandingan Target & Presentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Jenis pelayanan terhadap masyarakat meliputi Layanan Informasi Konsumen tidak termasuk pengujian laboratorium untuk sampel dari pihak ketiga. Perbandingan target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat Balai POM di Mamuju tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel diatas.



Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait layanan publik dengan mengikuti pelatihan pelayanan prima secara berkesinambungan.
- Balai POM di Mamuju senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan publik.

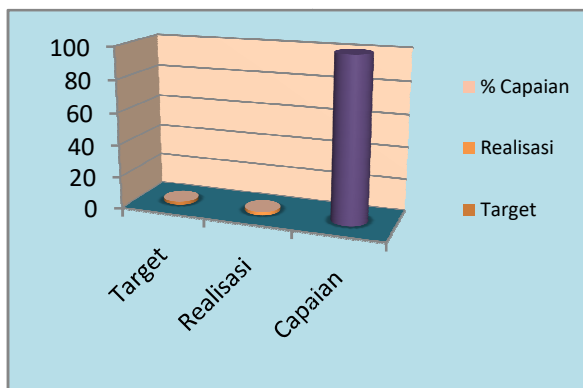
Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 92,59% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 110,77%. Target tingkat kepuasan masyarakat di Balai POM di Mamuju adalah 60% terdiri dari 60 persen jumlah responden yang memberikan nilai 9 atau 10, dan pada akhir periode pelaporan jumlah responden yang memberikan nilai 9 atau 10 adalah 55,56% sedangkan target indikator ini pada Balai POM di Sofifi adalah 65% dan realisasi pada periode pelaporan adalah 72%.

2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan adalah keterikatan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara mandiri dan/atau terpadu melalui pengawasan, advokasi pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan dengan menggunakan anggaran daerah baik berupa APBD Kabupaten maupun sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pendekatan yang lebih intensif terhadap pemerintah kabupaten yang telah memberikan komitmen tersebut perlu tetap dilakukan agar peng-alokasian anggaran pelaksanaan regulasi pengawasan Obat dan Makanan tersebut tetap dipertahankan. Demikian pula terhadap Kabupaten yang belum memberikan komitmen, perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif agar dapat meng-alokasikan anggarannya untuk pengawasan Obat dan Makanan.

Target dari indikator kinerja ini adalah 2 kabupaten dan terealisasi sebanyak 2 kabupaten sehingga persentase capaian sebesar 100%, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pemenuhan indikator kinerja ini yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pemerintah kabupaten dan Balai POM di Mamuju meliputi Kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT) dan Intensifikasi pengawasan obat dan makanan secara terpadu.

Grafik 5. Perbandingan Target & Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2



Perbandingan target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat

dan Makanan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel diatas :

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100%, akan tetapi target jumlah kabupaten yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 2 kabupaten dibandingkan target Balai POM di Sofifi yaitu 1 kabupaten.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis - 2

Sasaran
Program

(2) Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemanaku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 20. Sasaran Kegiatan

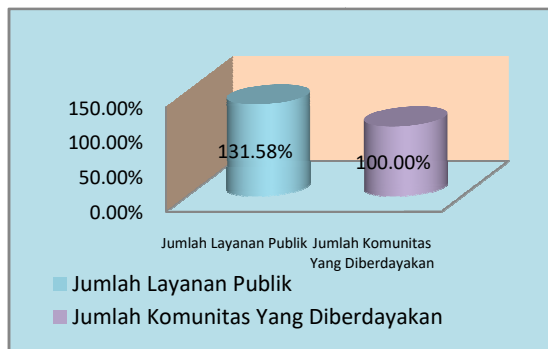
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	19	25	131,58%
	Jumlah komunitas yang diberdayakan	2	2	100%

Tabel 21.

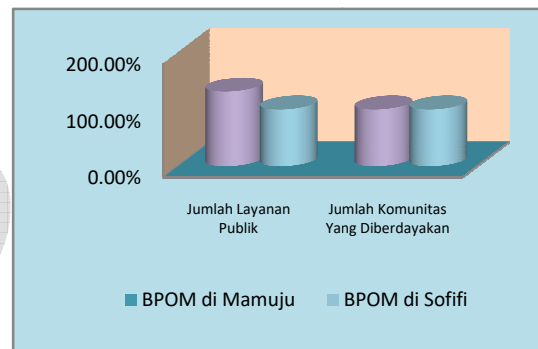
Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi

Indikator Kegiatan	BPOM di Mamuju			BPOM di Sofifi		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah layanan publik	19	25	131,58%	19	19	100%
Jumlah komunitas yang diberdayakan	2	2	100%	2	2	100%

Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja BPOM di Mamuju Tahun 2017



Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi



1. Layanan Publik

Layanan publik Balai POM di Mamuju berupa layanan informasi dan layanan sertifikasi. Layanan informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. Sedangkan layanan sertifikasi dihitung dari jumlah rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri Pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal; pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; Laporan Hasil Pengujian, akan tetapi pada tahun 2017 layanan sertifikasi untuk pengujian sampel pihak ketiga belum dilakukan karena Balai POM di Mamuju belum memiliki laboratorium untuk pengujian sampel baik sampel rutin maupun sampel pihak ketiga.

Target dari layanan ini adalah 19 layanan dan capaian realisasi sebanyak 25 layanan sehingga persentase capaian sebesar 131,58%. Capaian layanan tersebut terdiri dari :

1. Layanan ULPK sebanyak 18 Layanan
2. Penyebaran Informasi sebanyak 2 layanan
3. KIE bersama Tokoh Masyarakat sebanyak 1 layanan

4. KIE melalui Pameran sebanyak 1 layanan
5. Penyuluhan Keamanan Pangan sebanyak 1 layanan
6. Sertifikasi sarana pangan MD sebanyak 2 layanan

Realisasi Layanan Publik Balai POM di Mamuju tahun 2017 melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

- Rendahnya penetapan target layanan publik pada tahun 2017 karena masih mengacu pada target capaian Balai POM di Sofifi mengingat Balai POM di Mamuju belum mempunyai data Layanan Publik di tahun sebelumnya.
- Adanya percepatan sertifikasi pangan industri rumah tangga (PIRT) menyebabkan banyaknya layanan publik dari UMKM.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk Meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain dengan *me-review* kembali Target Capaian Indikator Layanan Publik.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih tinggi yaitu 131,58% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100,00%. Target layanan publik di Balai POM di Mamuju adalah 19 dan pada akhir periode pelaporan realisasi adalah 25 layanan sedangkan target indikator ini pada Balai POM di Sofifi adalah 19 layanan dan realisasi pada periode pelaporan adalah 19 layanan.

2. Komunitas yang diberdayakan

Komunitas yang diberdayakan adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan yang diberdayakan. Target kegiatan ini adalah 2 komunitas, dan realisasi capaian adalah 2 komunitas sehingga persentasi capaian terhadap target sebesar 100%. Adapun komunitas yang diberdayakan yaitu 2 (dua) Desa /Kelurahan yang diintervensi sebagai berikut :

1. Desa Karampuang Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
2. Desa Beru Beru Kec. Mamuju, Kab. Mamuju

Penetapan Pemberdayaan Komunitas 2 (dua) Desa ini berdasarkan kesepakatan antara Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamuju dengan pertimbangan bahwa kedua desa tersebut merupakan daerah tujuan wisata dan banyaknya produsen industry rumah tangga pangan (IRTP).

Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan memberdayakan kader keamanan pangan, tim keamanan pangan desa Korlap dalam memberikan Penyuluhan dan pendampingan (fasilitasi) ke berbagai komunitas (komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga /IRTP, dan Ritel).

Sebagai rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan pencapaian indikator ini, akan dilakukan perkuatan pemberdayaan kepada komunitas di kabupaten lain melalui advokasi GKPD di wilayah pengawasan Balai POM di Mamuju.

Realisasi capaian indikator kinerja ini sama dibandingkan realisasi untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100% terhadap target yaitu 2 komunitas diberdayakan.

Capaian Indikator Sasaran Strategis - 3

Tabel 22.

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan POM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai SAKIP dari Badan POM	(A)	(-)	(-)	Belum ada pengukuran

Pengukuran terhadap Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM, dengan kategori hasil penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 23.

Hasil Penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90	AA	Sangat memuaskan
> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
> 60 s.d. 70	B	Baik
> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
< 30	D	Kurang

Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju Tahun 2016 belum ada pengukuran dari Badan POM hal ini disebabkan karena Balai POM di Mamuju merupakan satker baru yang terbentuk dan mandiri dengan DIPA sendiri pada tahun 2017 sehingga penyusunan SAKIP dilakukan pertama kali pada tahun 2017 dan pengukurannya akan dilakukan pada tahun 2018.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk pencapaian indikator kinerja ini diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Mamuju terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Mamuju;
2. Mendorong peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju;
3. Meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rencana program kegiatan (penetapan target indikator kinerja);
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-Performance* sebagai salah satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM yang merupakan sistem pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis *Balance Scorecard* (BSC);
5. Meningkatkan kepedulian dan melakukan penyegaran secara berkala terkait pemahaman maupun implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh komponen di Balai POM di Mamuju.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang target sasaran strategis 3 ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis- 3

Sasaran Program

(3) Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM

Tabel 24.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategi – 3

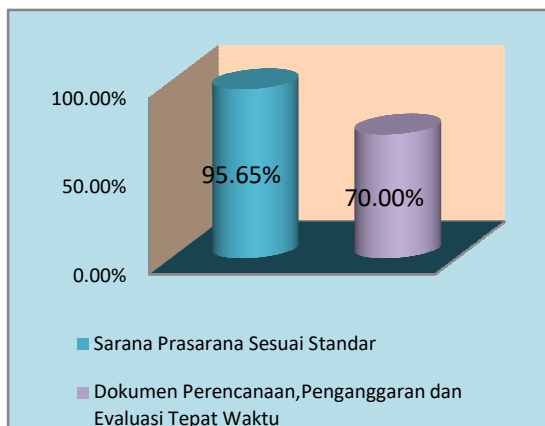
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30	28,70	95,65
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	2	70%

Tabel 25.

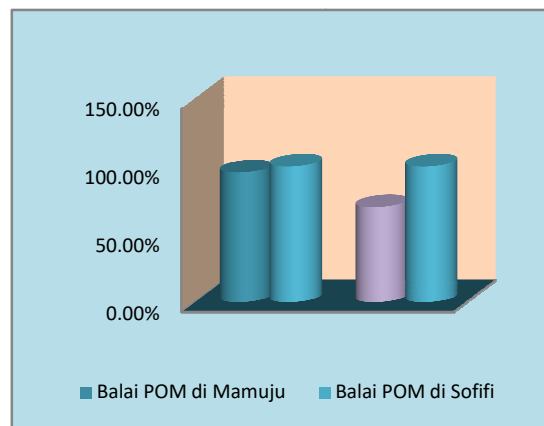
Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju dan BPOM di Sofifi

Indikator Kegiatan	BPOM di Mamuju			BPOM di Sofifi		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30	28,70	95,65	30	30,01	100,03
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	7	70	9	9	100

Grafik 8. Capaian Indikator Kinerja BPOM Mamuju Tahun 2017



Grafik 9. Perbandingan capaian Indikator Kegiatan BPOM di Mamuju & BPOM di Sofifi



1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan obat dan Makanan

Indikator kegiatan ini adalah presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. Pengukuran terhadap kegiatan ini berasal dari :

- Pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan berupa Pengadaan alat pengolahan data dan meublair dengan target 115 unit realisasi capaian 99 unit sehingga presentase capaian sebesar 86,09%.
- Alat laboratorium sesuai standar yang dimiliki dari target 17 unit, tidak ada realisasi capaian, hal ini disebabkan karena Balai POM di Mamuju belum memiliki gedung laboratorium, untuk pengujian sampel rutin masih dilakukan di Balai Besar POM di Makassar sehingga persentase capaian indikator kegiatan ini sebesar 0%;
- Luas Bangunan dengan target 188,44 m², tidak ada realisasi ,hal ini disebabkan karena Balai POM di Mamuju belum memiliki gedung sendiri dan dalam operasional kegiatan sehari hari masih menggunakan gedung kantor dengan status sewa atau kontrak, sehingga persentase capaian indikator kegiatan ini sebesar 0%.

Persentase rata-rata pemenuhan terhadap sarana sesuai standar Balai POM di Mamuju sebesar 86,09 % dibagi 3 adalah 28,70%.Persentase capaian dari indikator kinerja kegiatan ini adalah 95,65% dengan realisasi 28,70% dari target 30,00% untuk tahun 2017. Terhadap target tahun 2019 (35,00%), nilai capaian untuk indikator kegiatan ini adalah 82,00%. Mengingat nilai capaian tidak melampaui target tahun 2019, maka tidak perlu di lakukan *review* terhadap target kegiatan ini. Untuk pencapaian terhadap indikator kinerja yang terkait pemenuhan sarana dan prasarana Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan maka perlu dilakukan beberapa hal :

- Mempercepat pembangunan gedung kantor dan gedung laboratorium Balai POM di Mamuju dengan perencanaan penganggaran yang cermat dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.

- Pengadaan alat laboratorium yang memenuhi standar minimal laboratorium dari PPOMN Badan POM RI untuk mengakomodir jumlah parameter uji kritis yang wajib diujikan.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 95,65% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100,03%. Target pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standard di Balai POM di Mamuju adalah 30 % dan pada akhir priode pelaporan realisasi adalah 28,70 % sedangkan target indikator ini pada Balai POM di Sofifi adalah 30 % dan realisasi pada periode pelaporan adalah 30,01 %, dari 28.70% capaian Balai POM di Mamuju dari target 30 % adalah realisasi pemenuhan sarana prasara terkait Meubelair dan Alat Pengolah Data, untuk pemenuhan sarana terkait Alat Laboratorium dan Luas Bangunan belum terpenuhi karena Balai POM di Mamuju belum memiliki gedung kantor dan gedung laboratorium.

1. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Dokumen yang dihasilkan dari indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Renstra periode 2017 - 2019
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- c. RKAKL/DIPA Tahun 2017
- d. Laporan Kinerja Tahun 2016
- e. Laporan Triwulan I Tahun 2017
- f. Laporan Triwulan II Tahun 2017
- g. Laporan Triwulan III Tahun 2017
- h. Laporan Tahunan 2016
- i. Laporan Keuangan Tahun 2016, dan
- j. Laporan keuangan semester I Tahun 2017

Persentase capaian dari indikator kinerja kegiatan ini adalah 70,00% dengan realisasi 7 dokumen dari target 10 dokumen untuk tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Balai POM di Mamuju beroperasi dengan DIPA sendiri pada tahun 2017 sehingga penyusunan LAPKIN dan LAPTAAH serta Laporan

Keuangan periode tahun 2016 belum dilakukan. Terhadap target tahun 2019 (9 dokumen) nilai capaian untuk indikator kegiatan ini adalah 77,78%, karena nilai capaian tidak melampaui target tahun 2019, maka tidak perlu dilakukan *review* terhadap target kegiatan ini.

Dari hasil analisis ketiga sasaran strategis diatas, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1, yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2017 sebesar 114,33% (Memuaskan).
- Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada tahun 2017 sebesar 82,4% (Cukup).
- Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM belum ada pengukuran karena Nilai SAKIP dari Badan POM RI untuk Balai POM di Mamuju tahun 2016 belum ada karena Balai POM di Mamuju merupakan satker baru terbentuk dan beroperasi dengan DIPA sendiri pada tahun 2017.

Realisasi persentase capaian indikator kinerja ini untuk Balai POM di Mamuju lebih rendah yaitu 70,00% dibandingkan realisasi capaian untuk indikator yang sama di Balai POM di Sofifi yaitu 100,00%. Target dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu di Balai POM di Mamuju adalah 10 dokumen dan pada akhir priode pelaporan realisasi adalah 7 dokumen sedangkan target indikator ini pada Balai POM di Sofifi adalah 10 dokumen dan realisasi pada periode pelaporan adalah 10 dokumen, dari 10 dokumen capaian Balai POM di Sofifi, capaian Balai POM di Mamuju hanya 7 dokumen karena Balai POM di Mamuju adalah satker baru terbentuk ditahun 2017 sehingga ada 3 dokumen yang tidak realisasi yaitu LAPKIN 2016, LAPTAH 2016 dan Laporan Keuangan 2016.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2017, sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.419578/2017, Balai POM di Mamuju untuk pertama kalinya secara mandiri mengelola anggaran sebesar Rp. 12.413.515.000,- pada periode berjalan, berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor : B-KU-

02.1.21.07.17.3148 tanggal 7 Juli 2017 perihal Penyampaian Penghematan Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2017 dilakukan penghematan anggaran dalam bentuk *self blocking* (blokir mandiri) sehingga anggaran Balai POM di Mamuju menjadi Rp.12.037.890.000,- Per 31 Desember 2017 realisasi anggaran Balai POM di Mamuju sebesar Rp.8.077.411.126,- atau, 67,10%, adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja dan output kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 26.
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja*

SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Sasaran Strategis				
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	279.082.076	154.807.443	55,47
	Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	194.589.337	107.939.135	55,47
	Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	391.739.060	217.298.521	55,47
	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	64.009.650	35.506.294	55,47
	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	436.265.877	219.299.939	50,27
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	486.549.500	430.191.181	88,42
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	486.549.500	430.191.180	88,42
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju		6.482.177.4	66,83
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	631.348.673	436.565.117	69,15
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	11.401.327	8.679.227	76,12
Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	52.504.000	16.298.200	31,04
Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yg memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	471.387.000	21.858.446	47,07
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	199.045.000	51.450.343	25,85
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				

Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	700.103.000	645.993.047	92,27
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	272.996.000	214.389.314	78,53
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM				
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	8.294.808.000	5.175.488.374	62,39
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1.404.297.000	1.306.689.058	93,05

Tabel 27.
Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan

Kode	ES1-Program/Kegiatan/Output	Finansial		
		DIPA	Realisasi	%
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		12,037,890,000	8,077,411,126	67,10
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
001	Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	9,991,000	7,963,500	79,71
003	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	143,715,000	77,291,108	53,78
004	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	52,504,000	16,298,200	31,04
005	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	471,387,000	221,858,446	47,07
006	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	85,706,000	36,623,255	42,73
007	Layanan publik BB/BPOM	700,103,000	645,993,047	92,27
008	Komunitas yang diberdayakan	272,996,000	214,389,314	78,53
009	Sarana prasana sesuai standar	473,487,000	453,555,500	95,79
010	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1,404,297,000	1,306,689,058	93,05
011	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan	113,339,000	14,827,088	13,08
012	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	277,588,000	196,063,215	70,63
013	Bangunan/gedung	6,349,366,000	3,390,503,947	53,40
081	Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	211,456,000	163,926,521	77,52
951	Layanan Internal (Overhead)	1,046,000,000	1,032,743,057	98,73
994	Layanan Perkantoran	425,955,000	298,685,870	70,12
Grand Total		12,037,890,000	8,077,411,126	67,10

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain :

1. Pegawai Balai POM di Mamuju sebagian besar pindahan dari BBPOM di Makassar, sehingga gaji pegawai sebagian besar masih melekat pada DIPA BBPOM di Makassar sampai Triwulan III karena saat penganggaran 2017 jumlah pegawai Balai POM di Mamuju hanya 1 (satu) orang yaitu Kepala Balai POM di Mamuju.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi yang dimiliki Balai POM di Mamuju di bidang Keuangan serta banyaknya kegiatan prioritas lainnya yang tidak memungkinkan untuk melakukan revisi belanja pegawai dalam waktu yang singkat.
3. Keterbatasan SDM dan Kompetensi di Seksi Pemdik Serlik khususnya bidang penyidikan menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran belanja barang kurang maksimal, meskipun untuk target dari indikator kinerja jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan telah terpenuhi yaitu 1 (satu) perkara.
4. Adanya belanja modal yang dianggarkan di tahun 2017 yang tidak direalisasikan dan cukup signifikan mempengaruhi realisasi anggaran yaitu :
 - Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi untuk pekerjaan *cut fill* dan pematangan lahan tidak dapat direalisasikan dengan pertimbangan pekerjaan tersebut tidak efisien dengan menggunakan Management Konstruksi cukup menggunakan jasa Konsultan pengawas,
 - Pembangunan pagar tidak memungkinkan dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan talud mengingat masa pemeliharaan talud 6 bulan setelah selesainya pekerjaan.Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :
 - Akan dilakukan perencanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal lebih cermat.
 - Peningkatan kompetensi SDM yang ada diberbagai bidang untuk mempercepat realisasi kegiatan dan anggaran.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing bagian.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 28.
Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2017

Kode Output	ES1- Program/Kegiatan/Output	Finansial			
		% Capaian Anggaran	% Capaian Output	IE	TE
001	Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	79,71	0,00	0,00	-1,00
003	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	53,78	101,33	1,88	0,88
004	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	31,04	187,43	6,04	5,04
005	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	47,07	112,47	2,39	1,39
006	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	42,73	100,00	2,34	1,34
007	Layanan publik BB/BPOM	92,27	131,58	1,43	0,43
008	Komunitas yang diberdayakan	78,53	100,00	1,27	0,27

009	Sarana prasana sesuai standar	95,79	100,00	1,04	0,04
010	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	93,05	70,00	0,75	-0,25
011	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan	13,08	100,00	7,65	6,65
012	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	70,63	100,00	1,42	0,42
013	Bangunan/gedung	53,40	93,00	1,74	0,74
081	Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	77,52	68,33	0,88	-0,12
951	Layanan Internal (Overhead)	98,73	100,00	1,01	0,01
994	Layanan Perkantoran	70,12	100,00	1,43	0,43
Total		67,10	92,71	1,38	0,38

Dapat dilihat pada table diatas, dari hasil perhitungan tingkat efisiensi kegiatan, nilai TE yang diperoleh bervariasi yaitu -1,00 s/d 6,65 dari 15 output indikator kegiatan sebagaimana diketahui semakin tinggi nilai TE semakin tinggi tingkat efisiensi suatu kegiatan, output kegiatan dengan nilai TE tertinggi adalah Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan sedangkan output dengan nilai TE dibawah nol adalah Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis, Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, dan Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Output* kegiatan yang Efisien dengan nilai TE tertinggi yaitu Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan karena persentase capaian anggaran yang lebih rendah dari persentase capaian *output* disebabkan karena :
 - Realisasi anggaran untuk *output* kegiatan ini relatif rendah hal ini karena perencanaan yang kurang cermat dalam hal pengalokasian anggaran dan penyusunan program kegiatan yang mendukung *output* ini sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.
 - Adanya kegiatan terpadu dengan pusat yang tidak terealisasi karena pemotongan anggaran dipusat saat *self blocking* pada periode

pelaporan tetapi anggaran di Balai POM di Mamuju tidak dilakukan pemotongan untuk *output* ini.

2. 3 (tiga) kegiatan yang tidak efisiensi karena Nilai persentase Capaian *output* lebih rendah dibandingkan persentase capaian *input*/anggaran dijelaskan sebagai berikut :

- Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis nilai TE -1,00 disebabkan karena sampling untuk obat KB terlambat dilaksanakan, setelah pengujian sampel obat KB diuji oleh Balai Besar POM di Makassar sedangkan Baku pembanding untuk sampel tersebut sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan uji sampel obat KB Balai POM di Mamuju sampai akhirnya periode pelaporan.
- Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu nilai TE -0,25 disebabkan karena Balai POM di Mamuju pada tahun 2017 baru beroperasi dengan DIPA sendiri sehingga Penyusunan LAPKIN dan LAPTAKH serta Laporan keuangan periode 2016 belum dilakukan sehingga persentase capaian *output* hanya 70 % dari target yang ditetapkan.
- Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis Nilai TE -0,12 disebabkan karena keterbatasan SDM di bidang pengujian, hanya 2(dua) orang PNS di seksi pengujian teranokoko dengan beban 360 item sampel, selain itu pengujian sampel Balai POM di Mamuju sangat bergantung pada laboratorium teranokoko Balai Besar POM di Makassar dengan kondisi keterbatasan alat dan saat melakukan pengujian laboratorium teranokoko dalam proses renovasi.



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Balai POM di Mamuju sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Mamuju kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis 2017 - 2019 dimana Balai POM di Mamuju telah menetapkan satu program utama yaitu Program pengawasan obat dan makanan. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan capaian indikator kinerja dari 3 sasaran strategis dan 8 sasaran program kegiatan serta capaian dari 15 indikator output kegiatan dengan alokasi anggaran di RKAKL sebesar Rp. 12.037.890.000,- Untuk meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam lingkup wilayah Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Balai POM di Mamuju baik dari segi SDM, Penganggaran dan infrastruktur;

2. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju;
3. Meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Mamuju dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik;
4. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket surveilan*;
5. Untuk meningkatkan sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal di perlukan dukungan sumber daya dan dana yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai.

2017

LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2017 - 2019**

No.	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Baseline	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi	K/L-N-B-Ns-	
				2017	2018	2019	2017	2018	2019			
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju												
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan											
	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	90.00	93.00	94.00	279.082.075	317.894.250	356.706.424		
	2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	80.00	83.00	85.00	194.589.337	221.651.036	248.712.736		
	3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	88.00	92.00	95.00	391.739.060	446.218.534	500.698.008		
	4	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	78.00	80.00	83.00	64.009.650	72.911.525	81.813.400		
	5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	80.00	83.00	85.00	436.265.877	489.622.655	542.979.432		
2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan											
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	60.00	65.00	70.00	486.549.500	400.018.000	486.549.500		
	2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	2.00	4.00	6.00	486.549.500	400.018.000	486.549.500		
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM											
	1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Barat	-	A	A	A	9.699.105.000	23.419.364.000	37.139.623.000		
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Di Mamuju												
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia												
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Barat	-	513	513	513	640.987.867	672.394.634	703.801.401		
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Barat	-	100.00	100.00	100.00	1.762.133	6.449.366	11.136.599		
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	7.41	7.41	8.33	52.504.000	120.000.000	187.496.000		
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	13.77	13.77	15.11	471.387.000	584.026.000	696.665.000		
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	1	1	2	199.045.000	165.428.000	131.811.000		
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Sulawesi Barat	-	19	19	25	700.103.000	181.623.000	220.911.509		
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Barat	-	2	4	6	272.996.000	618.413.000	752.187.491		
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Barat	-	30	35	35	8.294.808.000	22.691.375.000	35.985.140.880		
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Barat	-	10	9	9	1.404.297.000	727.989.000	1.154.482.120		

Program/Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Di Mamuju Tahun 2017

Anggaran

12,037,890,000

LAMPIRAN 2

**PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	90
		2	Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88
		4	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78
		5	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas Sampling dan Pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	1
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
1	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Di Mamuju Tahun

Anggaran

12,037,890,000

LAMPIRAN 3

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Program Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	90	100,00	111,11
		2	Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	100,00	125,00
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88	100,00	113,64
		4	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78	100,00	128,21
		5	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	80	78,95	98,68
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60,00	55,56	92,60
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	2	100
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju	A	-	-
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas Sampling dan Pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513	398	77,58
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)	10	10	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	13,89	187,43
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	15,49	112,47
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	1	1	100
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
1	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19	25	131,58%
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2	2	100
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30	28,70	95,65
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	7	70

Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : 12,037,890,000

Realisasi Anggaran Kegiatan : 8,077,411,126

Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 (terhadap anggaran tanpa self blocking) 67.10%

LAMPIRAN 4

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2017**

Unit Organisasi Eselon III : Balai POM di Mamuju
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET			
1		3	4	5		6	7	8			
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Mamuju	1	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input	: Dana	Rp.	9,991,000	Rp	7,963,500	80%
					Output	: Jumlah Sampel Obat KB yang diuji dengan Parameter Kritis	3	sampel	0	sampel	0%
			2	Sampel makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	Input	: Dana	Rp.	143,715,000	Rp	77,291,108	54%
					Output	: Jumlah Sampel makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	150	sampel	152	sampel	101%
			3	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp.	52,504,000	Rp	16,298,200	31%
					Output	: Jumlah Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan	7	sarana	14	sarana	187%
			4	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp.	471,387,000	Rp	221,858,446	47%
					Output	: Persentase Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan	14	sarana	15	sarana	112%
			5	Perkara di bidang penyidikan dan tindak pidana	Input	: Dana	Rp.	85,706,000		36,628,255	43%
					Output	: Jumlah Perkara di bidang penyidikan dan tindak pidana	1	perkara	1	perkara	100%
			6	Layanan Publik BB/ BPOM	Input	: Dana	Rp.	700,103,000	Rp	645,993,047	92%
					Output	: Jumlah Layanan Publik BB/ BPOM yang diselenggarakan	19	layanan	25	layanan	132%
			7	Komunitas yang diberdayakan	Input	: Dana	Rp.	272,996,000	Rp	214,389,314	79%
					Output	: Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2	komunitas	2	komunitas	100%
			8	Sarana Prasarana Sesuai standar	Input	: Dana	Rp.	473,487,000	Rp	453,555,500	96%
					Output	: Jumlah Sarana Prasarana Sesuai standar	10	Sarana	10	Sarana	100%

2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat		9	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat waktu	Input	: Dana	Rp.	1,404,297,000	Rp.	1,306,689,058	93%
					Output	: Jumlah Dokumen Perencanaan,		10	dokumen	100	dokumen
			10	Laporan dukungan teknis Investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input	: Dana	Rp.	113,339,000	Rp.	14,827,088	13%
					Output	: Jumlah Laporan dukungan teknis Investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani		1	laporan	1	laporan
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas kelambagaan BPOM		11	Dokumen dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	Input	: Dana	Rp.	277,588,000		196,063,215	71%
					Output	: Jumlah Dokumen dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan		1	dokumen	1	dokumen
			13	Bangunan/ Gedung	Input	: Dana	Rp.	6,349,366,000	Rp.	3,390,503,947	53%
					Output	: Luas Bangunan/ Gedung yang telah dibangun			9.529 m2		8861,97 m2
			13	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input	: Dana	Rp.	211,456,000		163,926,521	78%
					Output	: Jumlah Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis		360	sampel	246	sampel
			14	Layanan Internal	Input	: Dana	Rp.	1,046,000,000	Rp.	1,032,743,057	99%
					Output	: Jumlah Layanan Internal yang diselenggarakan oleh kantor		1	Layanan	1	Layanan
			15	Layanan Perkantoran	Input	: Dana	Rp.	425,955,000		298,685,870	70%
					Output	: Jumlah Layanan Perkantoran yang diselenggarakan		12	Bulan	12	Bulan
				Total			12,037,890,000		8,077,416,126	2491.65%	

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju
 Realisasi Anggaran Kegiatan :

8,077,416,126

LAMPIRAN 5

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI POM DI MAMUJU**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN		TARGET	REALISASI	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
	Uraian	Uraian	INPUT (%)			OUTPUT (%)					
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	9,991,000	7,963,500	79,71	0	0.00	1	Tidak Efisien	- 1.00
		2	Sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis	211,456,000	163,926,521	72,52	61,35	0.85	1	Tidak Efisien	- 0.15
		3	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	85,706,000	36,623,255	42,73	100,00	2.34	1	Efisien	1.34
		4	Sampel makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	143,715,000	77,291,108	53,78	101,33	1.88	1	Efisien	0.88
		5	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	52,504,000	16,298,200	31,04	187,43	6.04	1	Efisien	5.04
		6	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	471,387,000	221,858,446	47,07	112,47	2.39	1	Efisien	1.39
		7	Laporan dukungan teknis Investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	113,339,000	14,827,088	13,08	100,00	7.65	1	Efisien	6.65
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Layanan Publik BB/ BPOM	700,103,000	645,993,047	92,27	131,58	1.43	1	Efisien	0.43
		2	Komunitas yang diberdayakan	272,996,000	214,389,314	78,53	100,00	1.27	1	Efisien	0.27
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas kelambagaan BPOM	1	Sarana prasarana sesuai standar	473,487,000	453,555,500	95,79	100,00	1.04	1	Efisien	0.04
		2	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1,404,297,000	1,306,689,058	93,05	70,00	0.75	1	Tidak Efisien	- 0.25
		3	Layanan Internal	1,046,000,000	1,032,743,057	98,75	100,00	1.01	1	Efisien	0.01
		4	Layanan Perkantoran	425,955,000	298,685,870	70,12	100,00	1.43	1	Efisien	0.43
		5	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	277,588,000	196,063,215	70,63	100,00	1.42	1	Efisien	0.42
		6	Bangunan/ Gedung	6,349,366,000	3,390,503,947	53,40	93	1.74	1	Efisien	0.74

Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : 12,037,890,000

Realisasi Anggaran Kegiatan : 8,077,411,126

LAMPIRAN 6

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (NPS)
BALAI POM DI MAMUJU
TAHUN 2017**

Unit Organisasi : Balai POM di Mamuju
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	BOBOT	% X BOBOT INDIKATOR	NP\$
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	100	111	0	22	115.33
		2	Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	80	100	125	0	25	
		3	Presentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	88	100	114	0	23	
		4	Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	78	100	128	0	26	
		5	Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	79	99	0	20	
2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	56	93	1	46	96.30
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan	2	2	100	1	50	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	A	-	-	1	-	0.00

Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : 12,037,890,000
 Realisasi Anggaran Kegiatan : 8,077,411,126
 Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : 67.10%